

MANAJEMEN STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SURAKARTA

Oleh: Sumilir Wijayanti

ABSTRACT

Surakarta development policy has a priority in poverty reduction as the elaboration in Vision Mission Mayor and Deputy Mayor. The poverty rate Surakarta in 2010 amounted to 14.99%. Performance targets set in 2015 by 10% with realization amounted to 10.97%. The performance targets set for poverty reduction RPJMD Surakarta 2016-2021 City at 7.5%. This is the underlying authors conducted a study analysis of strategic management for poverty reduction in Surakarta covering (strategy formulation, strategy implementation and assessment strategies) to describe poverty in Surakarta and what might be causing long-term targets are set is not reached.

The study authors conducted a qualitative study with research sites in the Secretariat TKPKD Surakarta and Village (Gajahan, Serengan, Pajang, Sumber and Kepatihan Wetan). The poverty problem in Surakarta identified include issues (health, education, employment, food security and basic welfare infrastructure).

The findings of the study of strategic management for poverty reduction in Surakarta, that : (1) in the formulation of the strategy, there are three factors that need attention : a. factor analysis of the external environment in order of priority on social issues, population and environment, b. factor internal analysis in order to focus on CSR's participation in the allocation of resources, c. The annual target-setting by the functional division can be selected as the basis for their next strategy. (2) in the implementation of the strategy there are two factors, that : a. integration of the functional division pattern is not clearly visible, is still partial and sectorial, for it needs to develop a correlation with a focus target poor people in the village with the highest poverty pockets, b. providing access to information and education to the poor, the development of innovation to be equipped with operational support, and the need to build an integrated system as well as providing space for public participation. (3) in the assessment of the strategy, there are two factors that : a. need consistency that the target of achieving long-term has not translated into the realization of the annual target of a functional division implementing poverty reduction programs, b. to be reviewed the appropriateness and feasibility beneficiaries of poverty alleviation programs associated with the administration of residence, and c. dalah potential competitive advantage and the vocational culture can be developed as a solution to poverty reduction.

Keywords : Strategy, Formulation, Implementation, Assessment Strategies and Achieving Performance

Pendahuluan

Setelah 71 tahun kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan pembangunan nasional belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan

menjadi tantangan Pemerintah dan pemangku kepentingan seluruh bangsa. Hakekat penanggulangan kemiskinan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan negara yaitu sebagaimana pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 dan selanjutnya dijabarkan dalam sila ke 5 dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Millenium Development Goals (MDGs) yang diratifikasi oleh Indonesia mempunyai tujuan yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Konsensus internasional tersebut membawa konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dari Pusat hingga Daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian prioritas yang harus diimplementasikan di daerah. Kepala Daerah Kota Surakarta yang terpilih saat ini untuk periode masa jabatan 2016-2021 merupakan periode ke dua masa kepemimpinan incumbent sebelumnya yaitu Bp. FX. Hadi Rudyatmo dan Bp. Achmad Purnomo. Program-program sebagaimana janji politis Kepala daerah merupakan lanjutan dari program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dengan Visi yang ingin dicapai yaitu “Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Dan Misi untuk RPJMD Tahun 2016-2021 adalah mewujudkan masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan. Misi ini pada hakekatnya adalah komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pada penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini. Adapun dimensi isu kemiskinan meliputi bidang (Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Kesejahteraan Dasar).

Sehubungan dengan konsepsi teoritis tentang manajemen strategis, mampu menggambarkan bahwa sebuah organisasi dapat berkinerja tinggi dalam mewujudkan misi organisasi. Mengingat bahwa manajemen strategis merupakan proses yang dinamis berlangsung terus menerus di dalam organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, dengan kemampuan ini sebuah organisasi dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan lingkungan.

Dalam manajemen strategis, manfaat yang dapat diperoleh adalah memungkinkan organisasi untuk lebih produktif, alih-alih reaktif dalam membangun masa depannya, memungkinkan organisasi untuk mengarahkan dan mempengaruhi berbagai aktivitas dan dengan demikian mengontrol takdirnya sendiri. Secara historis, manfaat utama dari manajemen strategis adalah untuk membantu organisasi merumuskan strategi-

strategi yang lebih baik melalui pendekatan terhadap pilihan strategis yang lebih sistematis, logis dan rasional.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta telah mengacu pada kebijakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) dengan sasaran program adalah warga miskin dengan lokus di masing-masing Kelurahan. Dari data yang penulis peroleh bahwa jumlah penduduk miskin yang mendapatkan intervensi program jaminan perlindungan sosial dan pemberdayaan pada kenyataan kurun waktu tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang berarti, tren data menunjukkan penurunan angka kemiskinan cenderung mengalami pelambatan, sedangkan alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan relatif cukup besar di tahun 2015 mencapai 99,2 milyar (sumber : TKPKD Kota Surakarta), menarik untuk diteliti bagaimana manajemen penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dijalankan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Surakarta Tahun 2012-2015 dapat diketahui sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Surakarta
Tahun 2011-2015

Wilayah	Jumlah Penduduk (n jiwa)			
	2012	2013	2014	2015
Kota Surakarta	586.978	545.653	563.659	552.650

Sumber : Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2015, diolah

Data jumlah penduduk miskin Kota Surakarta tahun 2011-2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2011-2015

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (n jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Surakarta	133.622	163.475	149.773	152.025	159.376

Sumber : BPS, TKPKD, Bappeda Kota Surakarta Tahun 2015, diolah

Merunut pada komitmen tentang Millenium Developmen Goals (MDGs) mentargetkan penurunan angka kemiskinan nasional di Tahun 2015 sebesar 7,5%. Sedang capaian kinerja penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta di Tahun 2015 yaitu target penurunan angka kemiskinan

dari 15 % di Tahun 2010 menjadi 10% di tahun 2015. Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta Tahun 2010-2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.3
Angka Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2010-2015

Indikator	Capaian Kinerja					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kemiskinan (%)	14,99	13,98	12,91	12,00	11,74	10,97

Sumber : TKPKD, Bappeda Kota Surakarta Tahun 2015

Penelitian ini menganalisis manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, menarik untuk diteliti sejauh mana deskripsi manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dijalankan menyesuaikan dinamika perkembangan waktu.

Untuk itu, penelitian ini dalam rangka mengetahui bagaimana deskripsi manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dijalankan?

Landasan Teori

Untuk menganalisis manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang terkait dengan manajemen strategis dan kemiskinan.

Teori Manajemen Strategis. Sebuah organisasi menunjukkan bahwa manajemen diperlukan, sebab tanpa manajemen organisasi hanya akan merupakan sekumpulan manusia yang tidak terkoordinir secara sistematis dan tidak bertujuan jelas. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, organisasi memerlukan struktur yang tepat dan sesuai dengan misi, teknologi, lingkungan, strategi serta keadaan internal dan eksternal organisasi (Andreas Budiarjo, 2014 ; 27).

Manajemen strategis menurut *Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi (2009 : 5) didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disiratkan oleh definisi ini, manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta system informasi computer untuk mencapai keberhasilan organisasional.

Manajemen stratejik merupakan suatu proses yang dinamis karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang dihadapi oleh satu organisasi baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu berubah-ubah pula. Dengan perkataan lain strategi manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena organisasi menjadi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektivitas dan produktivitasnya makin lama makin tinggi. Hanya dengan demikianlah tujuan dan berbagai sasarnya dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan (Sondang P. Siagian, 2012 : 27)

Tahapan dalam manajemen strategis menurut *Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi (2009 : 6-20), bahwa manajemen strategis terdiri dari : (1) pernyataan visi dan misi, (2) menetapkan tujuan jangka panjang, (3) menjalankan audit internal, (4) menjalankan audit eksternal, (5) menciptakan, mengevaluasi, dan memilih strategi, (6) mengimplementasikan strategi dengan isu-isu manajemen, (7) mengimplementasikan strategi dengan pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang dan *management information systems/MIS*, dan (8) mengukur dan mengevaluasi kinerja. Mengembangkan Pernyataan Visi dan Misi. Pernyataan Misi adalah pernyataan tujuan yang secara jelas melukiskan nilai dan prioritas dari sebuah organisasi. Mengembangkan sebuah pernyataan misi memaksa para penyusun strategi untuk berpikir mengenai hakekat dan cakupan operasi saat ini dan menilai potensi pasar dan aktivitas di masa yang akan datang. Pernyataan misi secara umum menggambarkan arah masa depan suatu organisasi, (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 :16).

Menetapkan Tujuan Jangka Panjang. Tujuan jangka panjang didefinisikan sebagai hasil-hasil spesifik yang ingin diraih oleh suatu organisasi terkait dengan misi dasarnya. Jangka panjang berarti lebih dari satu tahun. Tujuan sangat penting bagi keberhasilan organisasional sebab ia menentukan arah; membantu dalam evaluasi; menciptakan sinergi; menjelaskan prioritas; memfokuskan koordinasi dan menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian serta pengontrolan. Tujuan sebaiknya menantang, terukur, konsisten, masuk akal serta jelas. Tujuan harus ditetapkan untuk keseluruhan dan tiap-tiap divisi. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 18).

Menjalankan Audit Eksternal. Audit manajemen strategis eksternal disebut juga pemindai lingkungan (*environmental scanning*). Audit eksternal berfokus pada upaya identifikasi dan evaluasi trend an kejadian yang berada di luar kendali. Tujuan audit eksternal (external audit) adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan dan ancaman yang harus dihindari. Audit eksternal mengidentifikasi variabel-variabel penting yang menawarkan respon berupa tindakan secara defensif dan ofensif dengan merumuskan strategi yang bisa mengambil keuntungan dari peluang eksternal atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial. Kekuatan-kekuatan eksternal yang menjadi peluang bagi organisasi meliputi lima kategori : kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintahan dan hukum, kekuatan teknologi dan kekuatan kompetitif. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 120-121).

Menjalankan Audit Internal. Audit internal merupakan upaya identifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam area fungsional termasuk manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, penelitian dan pengembangan serta system informasi manajemen. Proses melakukan audit internal (internal audit) memberikan kesempatan lebih luas bagi para partisipan untuk memahami bagaimana pekerjaan, departemen dan divisi mereka dapat berfungsi secara tepat dalam organisasi secara keseluruhan. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 176).

Menciptakan, Mengevaluasi dan Memilih Strategi. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya dalam jumlah besar, biasanya untuk lima tahun kedepan dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan factor eksternal maupun internal yang dihadapi. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 19-20).

Mengimplementasikan Strategi – Isu-isu manajemen. Penerapan strategi mempengaruhi suatu organisasi dari atas ke bawah, mempengaruhi seluruh area fungsional dan divisional. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 386).

Penerapan manajemen strategis menjadikan organisasi mempunyai kinerja tinggi, dengan cirri-ciri utama antara lain : (1) mempunyai arah yang jelas (2) semangat kewirausahaan (3) rencana aksi strategis (4) efektivitas dan produktivitas

berorientasi pada hasil dan (5) komitmen mendalam dan upaya bersama (Sondang P. Siagian, 2012 : 27-29)

Menurut *Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi (2009 : 388), isu-isu manajemen dalam mengimplementasikan strategi meliputi : penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, pengelolaan konflik dan pencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan manajemen dipastikan lebih ekstensif ketika strategi yang diterapkan membawa kearah yang sama sekali baru.

Tujuan tahunan merupakan tonggak jangka pendek yang mesti dicapai organisasi untuk meraih tujuan jangka panjangnya. Seperti tujuan jangka panjang, tujuan tahunan mesti terukur, kuantitatif kuantitatif, menantang, realistis, konsisten dan terprioritas. Tujuan tahunan ditetapkan dilevel korporat, divisional dan fungsional dalam sebuah organisasi besar. Tujuan tahunan juga merepresentasikan dasar bagi pengalokasian sumber daya., (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi 2009 : 389-391).

Kebijakan adalah sarana yang dengannya tujuan tahunan akan dicapai. Kebijakan meliputi pedoman, aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung upaya-upaya pencapaian tujuan yang tersurat. Kebijakan adalah panduan untuk mengambil keputusan dan menangani situasi-situasi yang repetitive atau berulang-ulang. Kebijakan memungkinkan konsistensi dan koordinasi di dalam dan antar departemen organisasional. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 392-393).

Alokasi sumber daya merupakan aktivitas (kegiatan) utama manajemen berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Manajemen strategis kadang disebut sebagai proses alokasi sumber daya. Sejumlah factor yang biasanya menghambat alokasi sumber daya antara lain perlindungan yang berlebihan atas sumber daya, penekanan yang terlalu besar pada criteria keuangan jangka pendek, politik organisasi, sasaran strategi yang kabur, keengganan untuk mengambil resiko dan kurangnya pengetahuan. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 395).

Menurut *Yavitz* dan *Newman* yang dikutip oleh *Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi (2009 : 395) menyampaikan gambaran bahwa laporan dan anggaran yang berantakan menunjukkan peralihan alokasi sumber daya dari kebutuhan strategis ke pemborosan yang tidak perlu.

Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu /masalah. Konflik tak terhindarkan dalam organisasi

sehingga penting bahwa konflik tersebut dikelola dan dipecahkan sebelum konsekuensi disfungsi mempengaruhi kinerja organisasi. Konflik tidak selamanya buruk, ketiadaan konflik bisa menandakan sikap masa bodoh dan apatis. Adanya konflik dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan dan mengambil tindakan. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 396).

Mencocokkan struktur dengan strategi, perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, karena struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan, secara signifikan struktur mempengaruhi semua aktivitas penerapan strategi yang lain. Perubahan dalam strategi sering kali mengharuskan adanya perubahan struktur karena struktur mendikte bagaimana sumber daya dialokasikan. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 388).

Mengimplementasikan Strategi–Pemasaran, Keuangan/Akuntansi, Litbang dan MIS. Strategi tidak berpeluang untuk diterapkan secara berhasil di organisasi yang tidak mampu memasarkan produk dan jasa mereka dengan baik, tidak sanggup menggalang modal kerja, menghasilkan produk bermutu rendah secara teknologi atau yang memiliki sistem informasi manajemen lemah. Isu-isu pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang dan sistem informasi manajemen (SIM) yang penting bagi penerapan strategi yang efektif. (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 452).

Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja. Mengukur Kinerja, proses manajemen strategis menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa memiliki konsekuensi yang signifikan dan berjangka panjang. Evaluasi strategi menjadi vital bagi kebaikan suatu organisasi, evaluasi yang sesuai bisa menyadarkan manajemen akan masalah atau potensi masalah sebelum situasi menjadi kritis. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu merupakan evaluasi strategi yang efektif. Tekanan yang terlalu besar dari manajer puncak mendorong para manajer di bawah melakukan rekayasa angka. Penekanan yang terlalu besar pada evaluasi strategi bisa jadi mahal dan kontraproduktif (*Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 500).

Evaluasi strategi harus memiliki fokus jangka panjang dan jangka pendek. Empat criteria menurut *Ricard Rumelt* (dalam *Fred R. David* terjemahan Dono Sunardi, 2009 : 501) yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu strategi yaitu : konsistensi, kesesuaian, kelayakan dan keunggulan. Konsistensi (*consistency*) strategi pada tujuan, kesesuaian (*consonance*) strategi yang respon adaptif terhadap

lingkungan eksternal dan perubahan internal, kelayakan (*feasibility*) strategi tidak menguras sumber daya dimaknai sebagai kemampuan inovasi untuk menjalankan strategi, keunggulan (*advantage*) strategi memfasilitasi upaya menciptakan dan/atau mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang aktivitas tertentu. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dari salah satu bidang : sumber daya, ketrampilan, posisi.

Evaluasi strategi menjadi penting karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dimana faktor-faktor eksternal dan internal utama sering berubah dengan cepat dan dramatis.

Teori Kemiskinan. Menurut Bank Dunia, dalam Slamet (2014 : 6) menetapkan besaran pendapatan per kepala per hari sebesar US \$ 1.15 dan US \$ 2.00 kemampuan daya beli yang disamakan sebagai garis kemiskinan.

UNDP, mendefinisikan kemiskinan yang diukur dengan *the Human Poverty Index* atau Indek Kemiskinan Manusia (IKM), indek ini terdiri dari tiga komponen dasar yaitu ; *longevity*; menghitung prosentase penduduk yang meninggal sebelum berusia 40 tahun, *literacy*; presentase penduduk dewasa yang melek huruf, *living standard*; merupakan kombinasi dari persentase penduduk yang memiliki akses yang cepat pada layanan kesehatan, persentase penduduk yang memiliki akses air bersih dan sehat, serta persentase balita kurang gizi.

Berdasarkan atas hasil penelitian tentang skala *Guttman* untuk mengukur dimensi kemiskinan di daerah perkotaan, menurut Slamet (2014 : 32-61) menunjukkan adanya dua puluh dimensi kemiskinan masyarakat perkotaan, yang terdiri dari :

1. Dimensi kemampuan mencukupi kebutuhan pangan.
2. Dimensi kemampuan memperbaiki papan bila rusak.
3. Dimensi kemampuan mencukupi kebutuhan bahan bakar memasak dan energi.
4. Dimensi kebutuhan transportasi.
5. Dimensi keperluan sandang.
6. Dimensi keperluan sosial.
7. Dimensi pendidikan.
8. Dimensi penerangan di rumah.
9. Dimensi kesehatan dan sanitasi rumah.
10. Dimensi fasilitas air bersih.
11. Dimensi fasilitas ruangan rumah.
12. Dimensi perlengkapan dalam rumah.
13. Dimensi peralatan transportasi.
14. Dimensi peralatan komunikasi dan hiburan.
15. Dimensi peralatan rumah tangga elektronik.
16. Dimensi peralatan makan atau minum.

17. Dimensi pemilikan pakaian.
18. Dimensi menghidangkan menu makanan sehari-hari.
19. Dimensi kemampuan berobat.
20. Dimensi keikutsertaan dalam organisasi sosial, politik, ekonomi dan keagamaan.

Menurut BPS dalam slamet (2014 : 16 – 17) menggunakan empat belas indicator untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu :

1. Lantai rumah tinggal kurang dari delapan meter persegi per orang.
2. Lanatai rumah tinggal terbuat dari tanah.
3. Dinding rumah tinggal terbuat dari bamboo/kayu berkualitas rendah atau tidak terbuat dari batu bata yang diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas MCK.
5. Tidak memiliki listrik sebagai penerangan di rumah.
6. Minum air yang berasal dari sumber/ sumber air yang tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Energi untuk masak sehari-hari adalah kayu atau arang atau minyak tanah.
8. Mengonsumsi daging / susu / ayam hanya sekali seminggu.
9. Hanya membeli satu setel pakaian setahun.
10. Hanya bisa makan satu atau dua kali sehari.
11. Tidak dapat membayar biaya kesehatan di Puskesmas atau Poliklinik.
12. Sumber pendapatan kepala rumah tangga : petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, buruh, tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau tenaga kerja lain yang memiliki pendapatan bulanan kurang dari rp. 600.000,- per bulan.
13. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak menyelesaikan sekolah Dasar atau hanya lulus Sekolah Dasar.
14. Tidak memiliki tabungan dan/atau barang lain yang mudah dijual seharga Rp. 500.000,- yang berharga seperti sepeda motor (dengan mengangsur atau tidak mengangsur), emas, ternak, perahu motor atau barang-barang lain yang mudah dijual.

Rumah tangga dikategorikan miskin apabila ia memiliki setidaknya “Sembilan” indikator dari empat belas indikator.

Pengertian kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh orang miskin, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya (BAPPENAS, 1993 dalam (<http://www.jelajahinternet.com>)).

Deklarasi *Copenhagen* menjelaskan kemiskinan absolut sebagai sebuah kondisi yang ditandai dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi (<http://www.jelajahinternet.com>)).

Membicarakan masalah kemiskinan, kita akan menemui beberapa jenis-jenis kemiskinan yaitu: (1) Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien, (2) Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah, (3) Kemiskinan Struktural. Kemiskinan structural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah, (4) Kemiskinan Situsional atau kemiskinan natural. Kemiskinan situsional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin, dan (5) Kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin (Mardimin (1996:24) dalam <http://www.landasanteori.com>).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan (Mankiw, (1995 : 158) dalam [/www.globallavebookx.blogspot.co.id](http://www.globallavebookx.blogspot.co.id)).

Metode Penelitian

Paper ini berpijak dari hasil penelitian diskriptif kualitatif dengan pebekanan pada analisis manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. Metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014 : 1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subyek salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum, Sugiyono (2014 : 85).

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian kualitatif meneliti obyek alamiah dengan sumber data berupa fakta-fakta berdasarkan realitas yang ada dilapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan

informasi yang bermakna dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan dimungkinkan dapat direplikasi ke daerah lain untuk tujuan yang sama.

Informasi yang penulis teliti merupakan kumpulan dari fakta-fakta berdasarkan realitas yang diperoleh dari wawancara, observasi pengamatan dan kajian dokumen / laporan.

Penelitian dilakukan di Kota Surakarta dengan wilayah administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan dengan unit analisis Sekretariat Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Surakarta selaku unit pelaksana operasional penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, Kelurahan (Kepatihan Wetan, Gajahan, Serengan, Pajang dan Sumber).

Penentuan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian, Sugiyono (2014 : 50).

Informan yang menjadi Narasumber untuk data primer pada penelitian ini dari : Pelaksana Harian TKPKD Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Gakin dan Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Gajahan, Serengan, Pajang, Sumber dan Kepatihan Wetan). Untuk data sekunder penulis kompilasi dari SKPD pengampu urusan (Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaa/Sosial, Pangan dan Infrastruktur Dasar).

Jenis Dan Sumber Data Penelitian. Dalam Sugiyono (2014 : 62), sumber data dalam penelitian kualitatif menyesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menentukan jenis dan sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder). Jenis data primer/ langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber dari perwakilan SKPD/Instansi/lembaga tersebut diatas. Sedangkan jenis data sekunder / tidak langsung diperoleh dengan observasi, pengumpulan dokumen dan statistik lainnya.

Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Interview/ wawancara dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi penting yang diperlukan sehubungan dengan penerapan manajemen strategis sesuai kewenangan masing-masing, untuk beberapa informasi bidang isu kemiskinan diperoleh melalui *mini focus group discussion/ FGD*. 2.

Observasi, atau pengamatan dilakukan penulis untuk mengetahui dan mengamati berbagai kondisi dan lingkungan yang dapat ditemukan untuk menambah informasi dalam penelitian ini, seperti pola relasi, koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.

3. Studi dokumen, dengan mempelajari laporan-laporan dan dokumen lain yang dimiliki oleh SKPD/Instansi/Lembaga untuk melengkapi informasi sebelumnya dari wawancara dan observasi.

4. Triangulasi, dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, studi dokumen dan tinjauan pustaka /teori untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap manajemen strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.

Untuk mendapatkan gambaran kesimpulan penelitian, penulis membatasi lingkup penelitian manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta ini dengan batasan konsep dan operasional yang penulis identifikasi sebagai berikut :

Tahap	Konsep Teori Manajemen Strategis	Definisi operasional	Narasumber / Data
Perumusan Strategi	Mengembangkan pernyataan Visi dan Misi	Pernyataan tujuan yang dengan jelas melukiskan nilai dan prioritas dari organisasi	DPRD Bappeda TKPKD Masyarakat
	Menjalankan Audit Eksternal	Pemindai lingkungan (environment scanning) Meliputi : ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan kekuatan kompetitif (daya saing)	BPS Bappeda TKPKD Dispendukcapil Dishubkominfo Satpol PP
	Menjalankan audit Internal	a. Identifikasi kinerja divisi dan fungsional dalam organisasi, dikaitkan dengan bidang isu kemiskinan : 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Ketenagakerjaan 4. Ketahanan Pangan 5. Infrastruktur kesejahteraan Dasar b. Fungsi lain yaitu : Pengelolaan Konflik dan Pencocokan Struktur	a. Dikaitkan isu kemiskinan dan kewenangan : 1. DKK 2. Dikpora 3. Dinsosnakertrans 4. Bagian Perekonomian, Kantor ketahanan pangan, Dipertan 5. DPU, DKP dan PDAM b. TKPKD (Pokja-pokja)

		dengan Strategi c. Pelaksanaan wilayah /area based manajemen	c. Kelurahan dan Kecamatan
	Menetapkan Tujuan Jangka Panjang	Hasil-hasil yang ingin diraih organisasi terkait dengan misi dasarnya.	Bappeda TKPKD
	Menciptakan, Mengevaluasi dan Memilih Strategi	Sarana yang dipakai bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai	Bappeda TKPKD
Penerapan Strategi	Mengimplementasikan Strategi – Isu-isu Manajemen	Penerapan manajemen strategis menjadi ciri organisasi berkinerja tinggi, dilihat dari : - Arah yang jelas - Semangat kewirausahaan - Rencana aksi strategis - Efektivitas dan produktivitas berorientasi pada hasil - Komitmen mendalam upaya bersama	Bappeda TKPKD Tokoh Masyarakat
	Mengimplementasikan Strategi – Pemasaran, Keuangan/Akuntansi, Litbang dan MIS	Penunjang keberhasilan penerapan strategi dilihat dari : - Pemasaran produk dan jasa - Menggalang modal kerja - Pengembangan (inovasi) - Sistem Informasi	Bappeda TKPKD
Penilaian Strategi	Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja	a. Mengukur dan mengevaluasi strategi dilihat dari : - Konsistensi - Kesesuaian - Kelayakan - Keunggulan b. Mengukur Kinerja organisasi dari perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya (realisasi/actual)	Bappeda TKPKD

Teknik Analisis Data. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014 : 88) menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan

kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap informasi, data dan dokumen serta hasil pengamatan yang diperoleh dikaitkan dengan landasan teori manajemen strategis dan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta

Validitas Dan Reliabilitas Data. Uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya, Sugiyono (2014 : 119).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji validitas dengan triangulasi yaitu pemeriksaan data dari sumber-sumber yang berbeda untuk membangun penilaian tema-tema secara berhubungan, yang dilakukan dengan : membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan informan atau narasumber dengan data, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Sedangkan reliabilitas dilakukan dengan mengecek kembali data-data dan informasi yang diperoleh, bilamana diperlukan maka perlu dikonfirmasi dengan pihak-pihak terkait.

Hasil Dan Pembahasan

Kota Surakarta, dengan luas wilayah 44,04 km² yang terbagi menjadi lima wilayah kecamatan administratif, penambahan penduduk dan persebarannya sangat mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk per luasan wilayah. Berikut angka pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Surakarta, sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kota Surakarta Tahun 2015

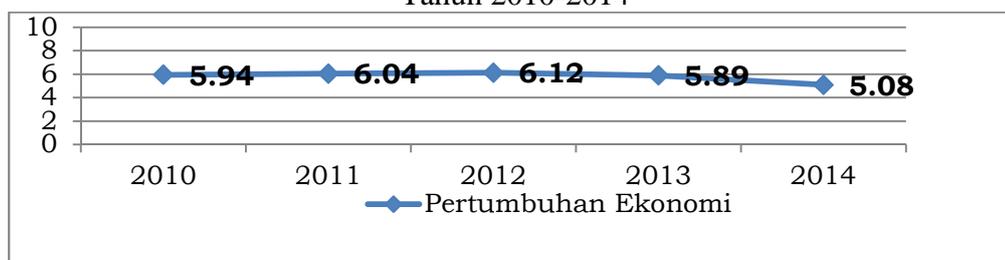
Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Laweyan	97.990	8,64	11.341
Serengan	53.135	3,19	16.657
Pasarkliwon	84.010	4,82	17.429
Jebres	142.136	12,58	11.299
Banjarsari	175.379	14,81	11.842
Total	552.650	44,04	12.549

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tahun 2015.

Secara umum kondisi ekonomi Kota Surakarta mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89% sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 5,08%. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan rupiah terhadap dolar dan kenaikan BBM. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2014 sebesar 5,08% menunjukkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,47%. Sementara itu jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 5,07%, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menunjukkan perkembangan lebih tinggi.

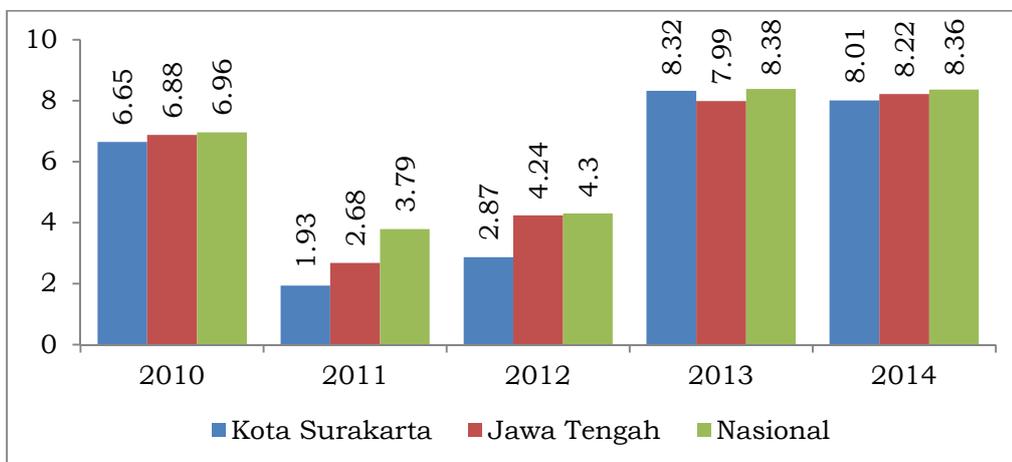
Kondisi ekonomi di Kota Surakarta juga turut dipengaruhi oleh inflasi, pada Tahun 2014 sebesar 8,01%. Perkembangan laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,01% menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8,32%. Rata rata inflasi secara umum kota Surakarta dibawah rata-rata inflasi provinsi Jawa Tengah maupun inflasi Nasional. Di tingkat provinsi Jawa Tengah inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,22% sedangkan tingkat Nasional sebesar 8,36%.

Gambar IV.2
Perkembangan Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Tahun 2014

Gambar IV.3
Perbandingan Inflasi Antara Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2010-2014

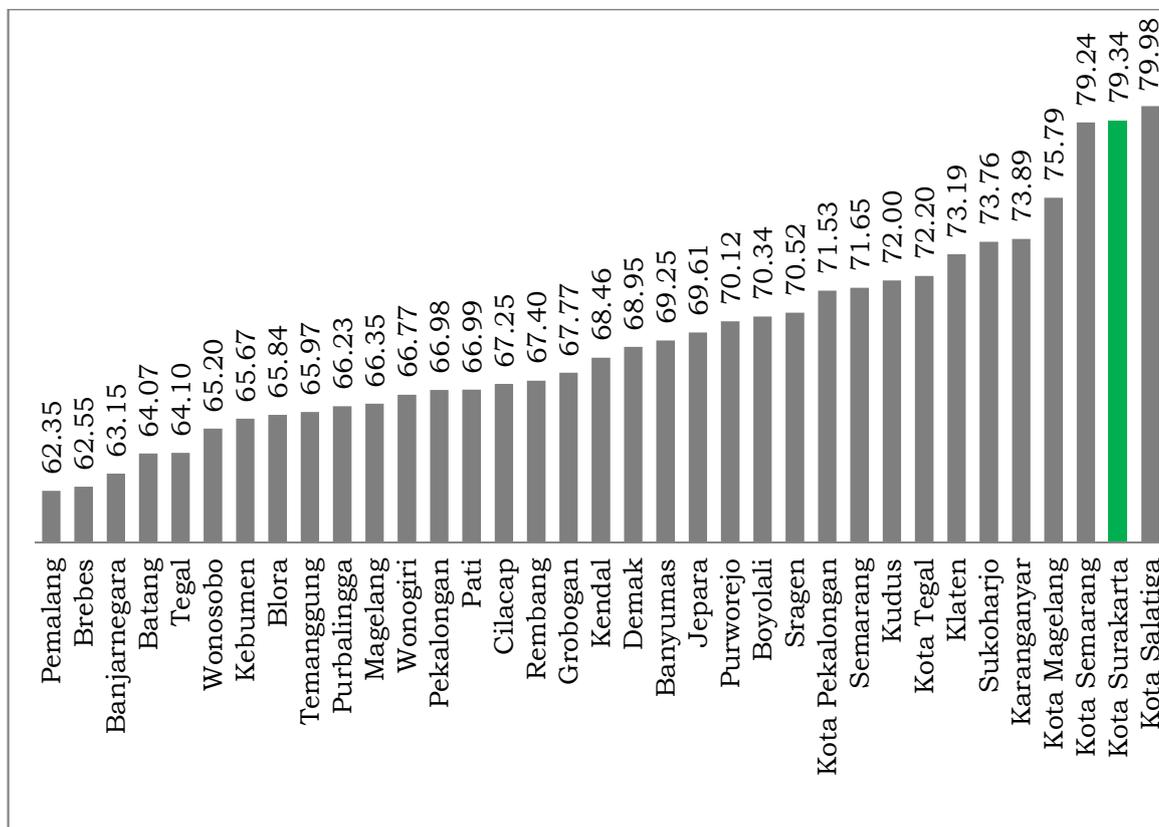


Sumber : BPS Kota Surakarta, 2015

Untuk gambaran umum kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator komposit IPM meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Di Kota Surakarta, angka harapan hidup adalah sebesar 76,99 tahun. Untuk angka harapan lama sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Di Kota Surakarta, pada tahun 2014 angka lama sekolah mencapai 13,92 tahun. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Pada rata-rata lama sekolah, di Kota Surakarta sudah mencapai 10,33 tahun. Rata-rata lama sekolah ini sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Tahun 2014 IPM Kota Surakarta sebesar 79,34 berada pada peringkat ke dua di Jawa Tengah. Untuk IPM rata-rata Jawa Tengah sebesar 68,78 adapun IPM terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Pemalang dengan indek 62,35. Kategori 10 Kab/Kota dengan dengan IPM tertinggi se Jawa Tengah sebagaimana tabel dan gambar berikut :

Gambar IV.4
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta
Tahun 2014



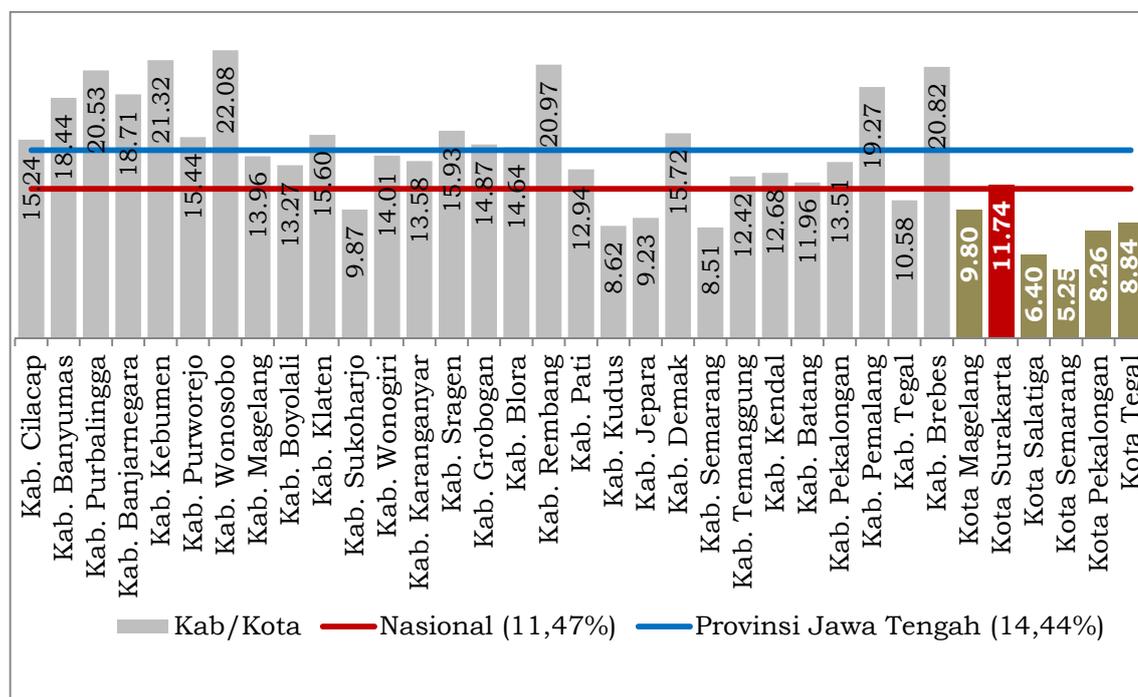
Sumber : BPS Tahun 2014

Kondisi Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan beberapa indikator yaitu indikator Tingkat Kemiskinan, Garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan Kota Surakarta pada Tahun 2010 sebesar 13,98% telah mengalami penurunan di Tahun 2013 sebesar 11,74% angka ini lebih tinggi dari rata-rata Nasional sebesar 11,47% dan lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 14,44%.

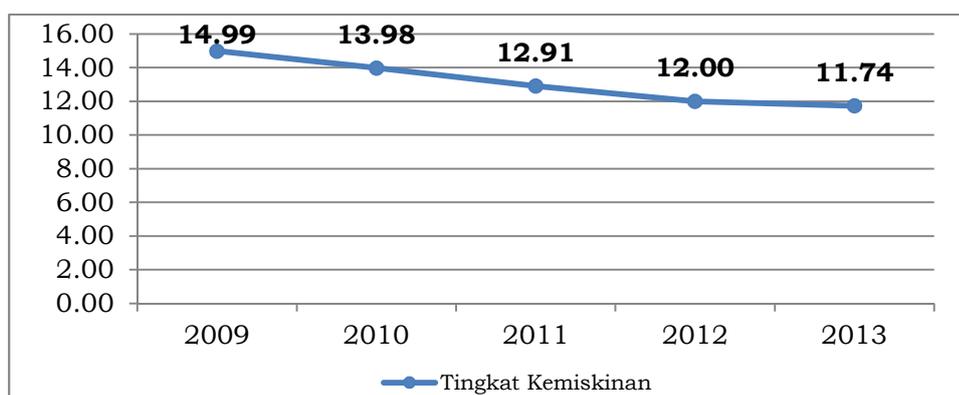
Grafik posisi relatif tingkat kemiskinan dan grafik perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta sebagaimana gambar berikut :

Gambar IV.5
Grafik Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kota Surakarta,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013



Sumber : BPS Tahun 2015

Gambar IV.6
Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Surakarta
Tahun 2009-2013



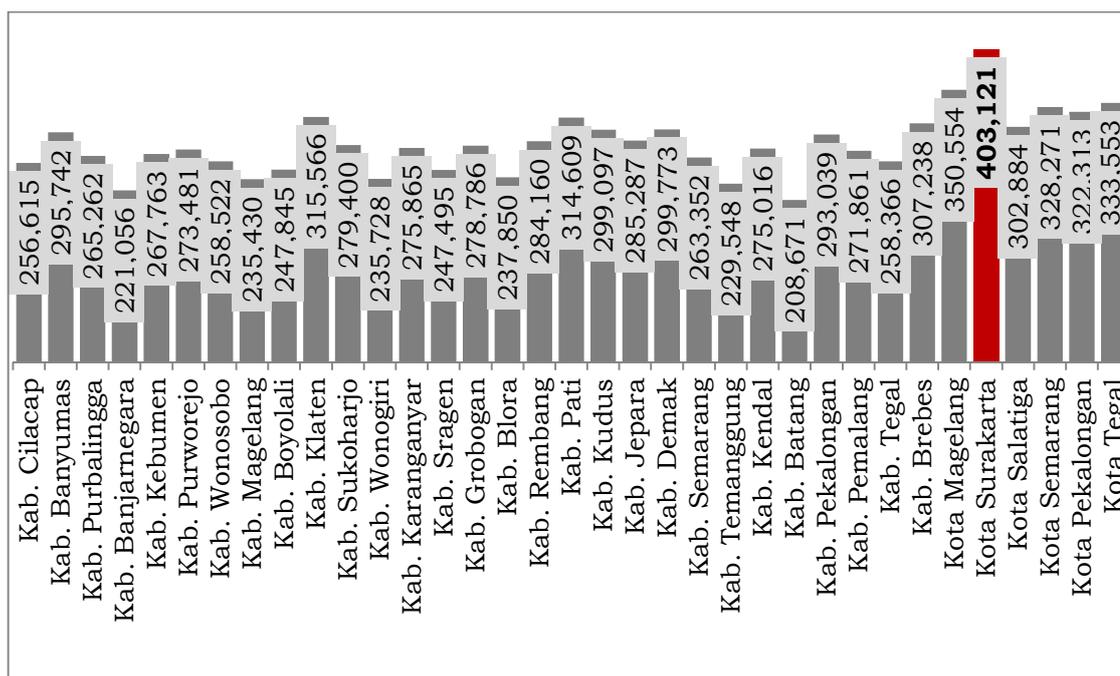
Sumber : BPS Tahun 2015

Garis Kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2013 sebesar Rp. 403.121,- (empat ratus tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata garis kemiskinan Jawa Tengah sebesar Rp. 261.880,- (dua ratus enam puluh satu ribu

delapan ratus delapan puluh rupiah) bila dibandingkan dengan garis kemiskinan Kab/Kota lain di Jawa Tengah maka Kota Surakarta terlihat paling besar, hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Kota Surakarta relatif lebih mahal.

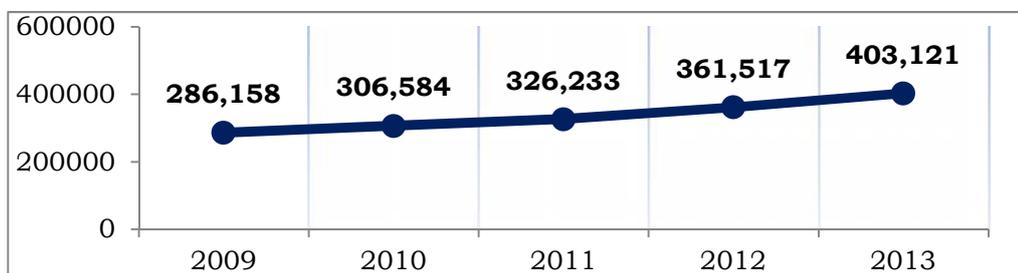
Grafik posisi relatif garis kemiskinan dan perkembangan garis kemiskinan di Kota Surakarta, sebagaimana gambar berikut :

Gambar IV.7
Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp)
Kota Surakarta Tahun 2013



Sumber : BPS Tahun 2014, diolah

Gambar IV.8
Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan
Kota Surakarta Tahun 2009-2013



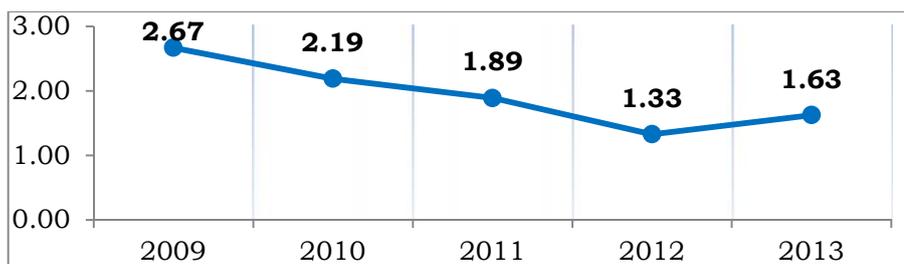
Sumber : BPS Tahun 2014, diolah

Indek Kedalaman Kemiskinan yang biasa disebut P1 untuk Kota Surakarta pada tahun 2010 sebesar 2,19 telah mengalami penurunan di Tahun 2014 sebesar

1,63. Indek ini untuk mengetahui kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

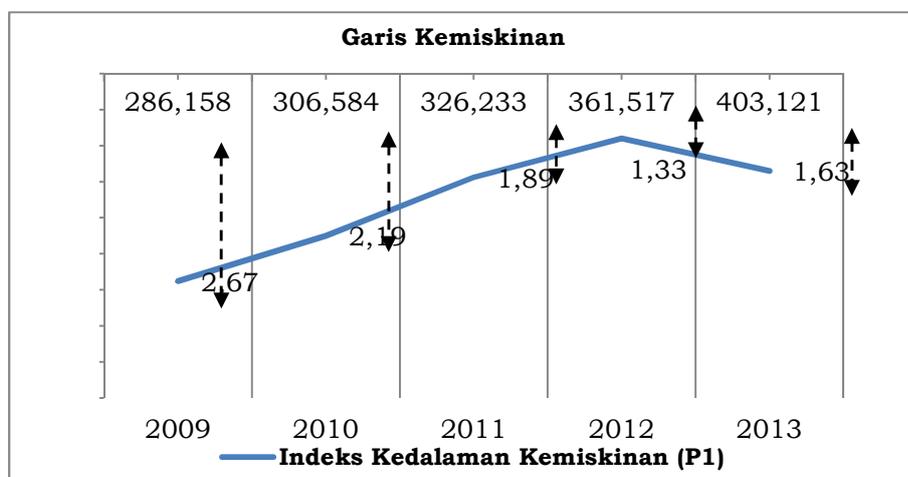
Grafik perkembangan indek kedalaman kemiskinan dan pergerakan indek kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kota Surakarta sebagaimana gambar berikut :

Gambar IV.9
Grafik Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kota Surakarta Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Tahun 2014, diolah

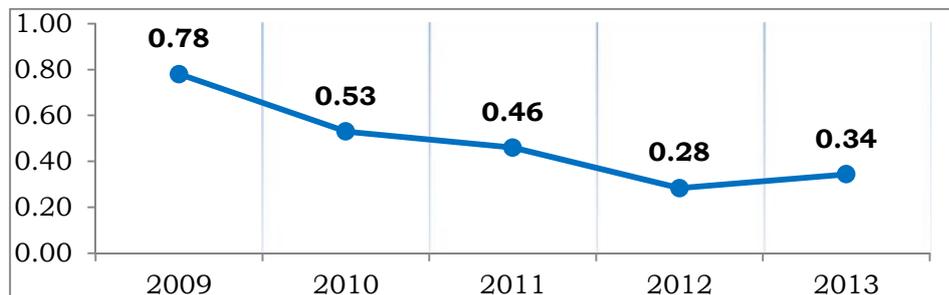
Gambar IV.10
Grafik Pergerakan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Terhadap Garis Kemiskinan
di Kota Surakarta Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Tahun 2014, diolah

Indek Keparahan Kemiskinan biasa disebut dengan P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indek maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indek Keparahan Kemiskinan di Kota Surakarta mengalami penurunan, pada Tahun 2010 P2 sebesar 0,53 untuk Tahun 2013 P2 sebesar 0,34. Grafik perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Surakarta, sebagaimana gambar berikut :

Gambar IV.11
Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kota Surakarta Tahun 2009-2013

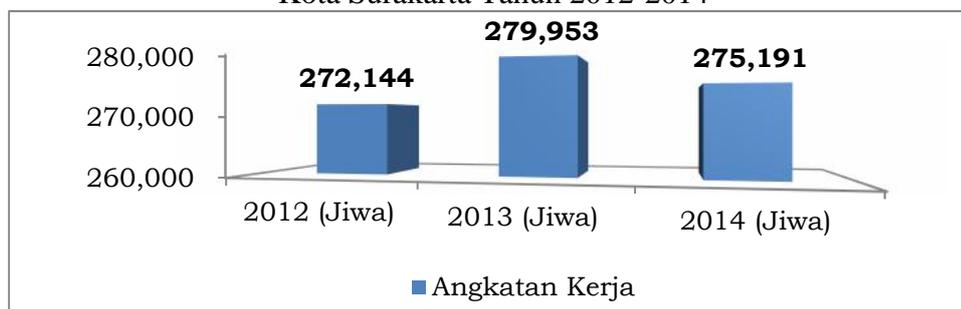


Sumber : BPS Tahun 2014, diolah

Dimensi Kemiskinan di Kota Surakarta. Dimensi Kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan pada kondisi capaian kinerja masing-masing urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Dasar.

Dari jumlah penduduk usia kerja Kota Surakarta pada Tahun 2014 sebesar 401.830 jiwa yang termasuk pada angkatan kerja sebesar 275.191 jiwa. Dimensi kemiskinan yang ditengarai pada bidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka. Data tingkat pengangguran Kota Surakarta pada Tahun 2014 sebesar 6,08% telah mengalami penurunan dari Tahun 2013 sebesar 7,18%. Grafik perkembangan jumlah penduduk usia kerja dan angka pengangguran terbuka di Kota Surakarta, sebagaimana gambar berikut :

Gambar IV.12
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)
Kota Surakarta Tahun 2012-2014



Sumber : BPS Tahun 2014, diolah

Adapun perkembangan tingkat pengangguran untuk kurun waktu 2010-2014 mengalami fluktuasi sebagaimana perkembangan pada gambar berikut :

Gambar IV.13
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kota Surakarta Tahun 2010-2014



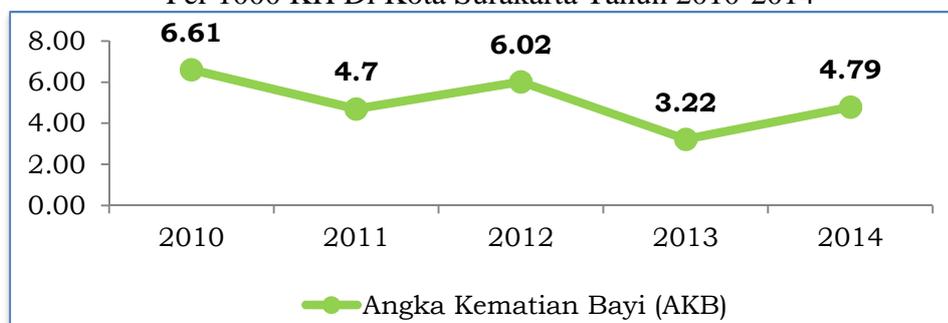
Sumber : BPS Tahun 2014

Bidang Kesehatan, dimensi kemiskinan pada bidang kesehatan yang perlu menjadi fokus perhatian adalah kematian bayi dan balita, kematian ibu melahirkan, prevalensi balita kurang gizi, prevalensi TBC dan Angka kematian akibat DBD. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surakarta pada Tahun 2015 adalah 4,79 per 1000 kelahiran hidup untuk Angka Kematian Balita (AKABA) pada Tahun 2015 adalah 0,51 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) pada Tahun 2014 adalah 71,35 per 100.000 kelahiran.

Dimensi kesehatan lainnya yang harus dicermati yaitu prevalensi balita kekurangan gizi pada Tahun 2015 sebesar 2,58%. Prevalensi penderita Tuberculosis (TBC) pada Tahun 2015 adalah 98,6 per 100.000 penduduk dengan proporsi kasus yang disembuhkan sebesar 90%. Adapun angka kematian akibat Demam Berdarah Degue (DBD) pada Tahun 2015 sebesar 1,56%.

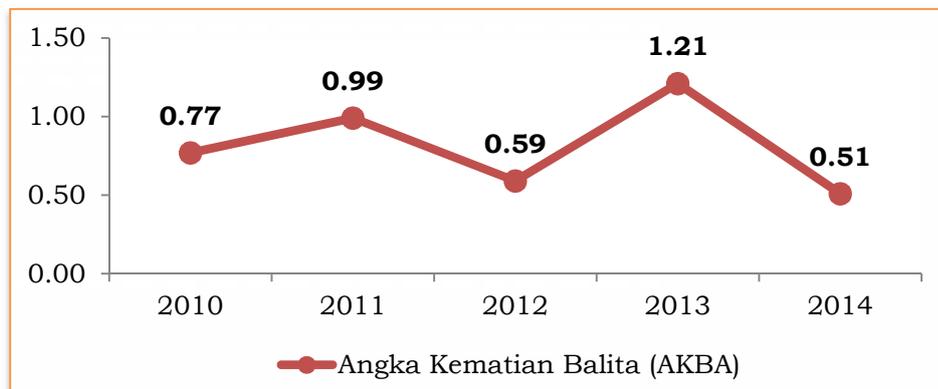
Indikator kemiskinan pada dimensi kesehatan yang tersebut diatas digambarkan pada gambar-gambar berikut :

Gambar IV.14
Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1000 KH Di Kota Surakarta Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.15
Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA)
Per 1000 KH Di Kota Surakarta Tahun 2010-2014



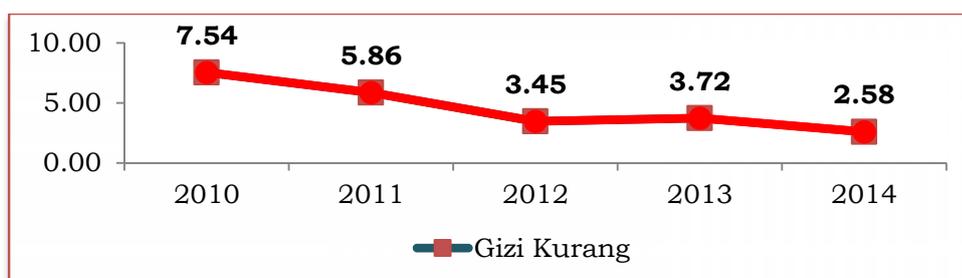
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.16
Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI)
Per 100.000 KH Di Kota Surakarta
Tahun 2010-2014



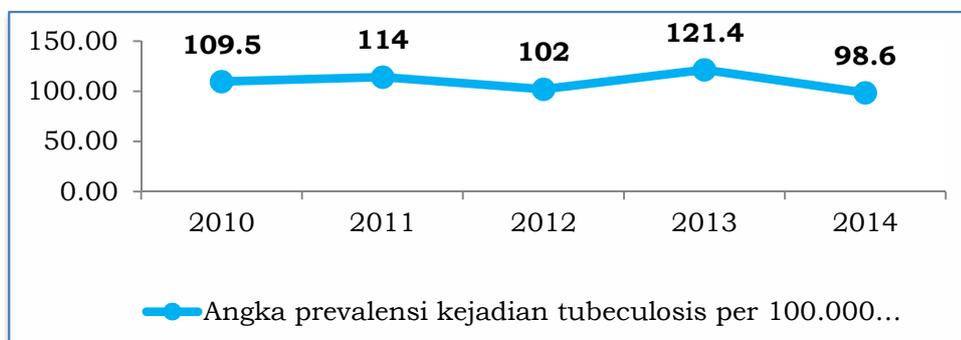
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.17
Grafik Perkembangan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)
Di Kota Surakarta Tahun 2010-2014



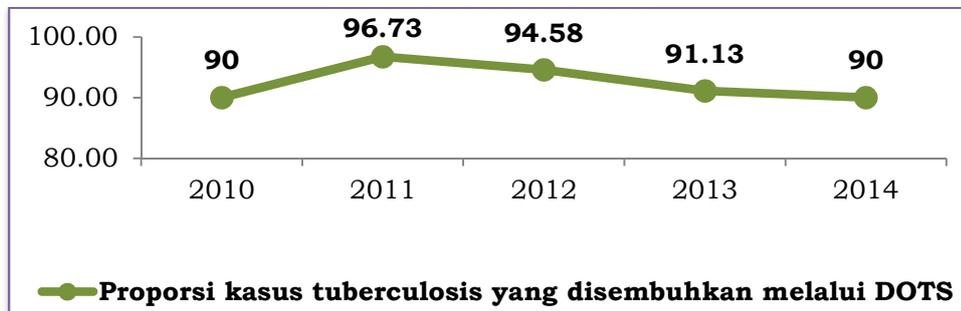
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.18
Grafik Perkembangan angka Prevalensi Kejadian Tuberculosis
Per 100.000 Penduduk Di Kota Surakarta
Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.19
Grafik Perkembangan Angka Kematian DBD
Di Kota Surakarta Tahun 2010-2014

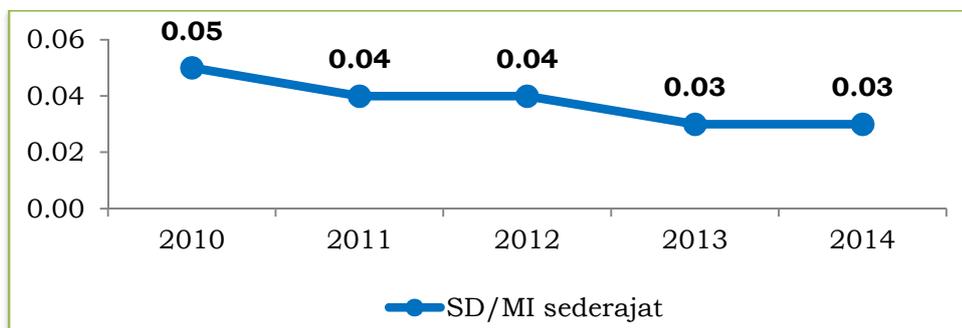


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2015

Bidang Pendidikan, dimensi kemiskinan yang ditengarai pada bidang pendidikan adalah Angka Putus Sekolah (APS). APS untuk jenjang pendidikan SD/MI pada Tahun 2015 sebesar 0,03%. APS jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2015 sebesar 0,35% dan APS jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada Tahun 2015 sebesar 0,50%.

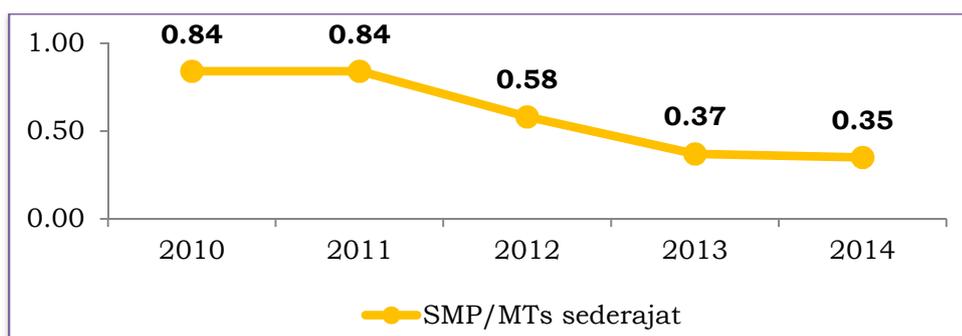
Grafik perkembangan angka putus sekolah di tiap jenjang pendidikan di Kota Surakarta sebagaimana gambar berikut :

Gambar IV.20
Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI Sederajat Kota Surakarta
Tahun 2010-2014



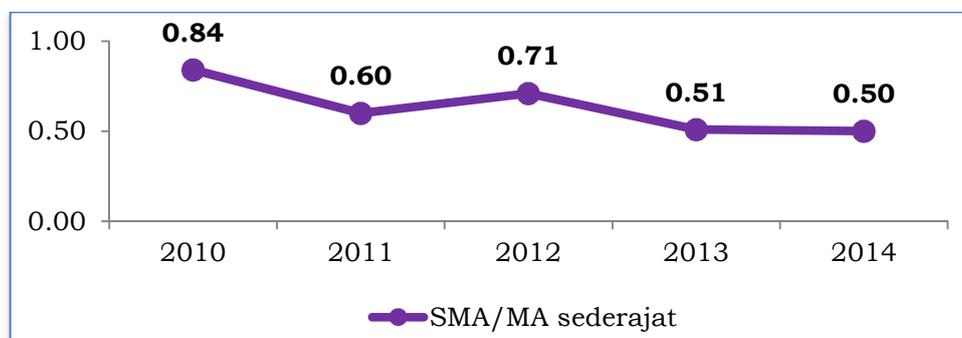
Sumber : Disdikpora Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.21
Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs Sederajat Kota Surakarta
Tahun 2010-2014



Sumber : Disdikpora Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.22
Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Sederajat
Kota Surakarta Tahun 2010-2014



Sumber : Disdikpora Kota Surakarta Tahun 2015

Bidang Ketahanan Pangan, untuk ketersediaan bahan pangan pokok di Kota Surakarta dipenuhi melalui mekanisme perdagangan dengan daerah sekitar mengingat Kota Surakarta tidak memiliki potensi lahan pangan yang memadai, sehingga konsumsi masyarakat dicukupi dengan penyediaan bahan pangan pokok dari kerjasama dengan daerah lain.

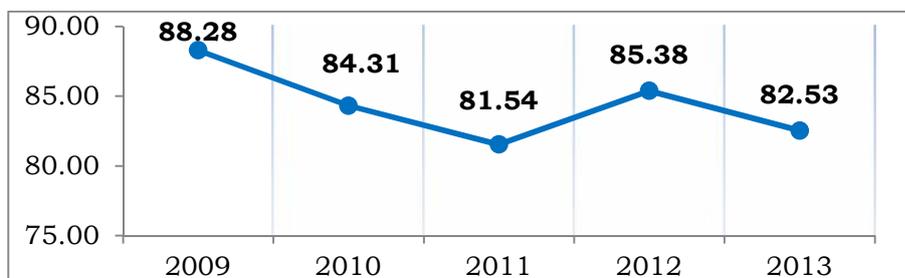
Adapun konsumsi pangan bagi warga miskin selama ini difasilitasi dengan program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Miskin Daerah (Raskinda). Raskin merupakan bantuan Pemerintah Pusat (APBN) yang mengacu pada data PPLS adapun Raskinda merupakan bantuan APBD Kota Surakarta bagi penduduk miskin diluar data PPLS, dimensi kemiskinan untuk konsumsi pangan masih sebatas kuantitas konsumsi beras, belum mampu mencukupi kebutuhan gizi seimbang.

Bidang Infrastruktur Dasar, dimensi kemiskinan yang ditengarai pada bidang infrastruktur kesejahteraan dasar adalah aksesibilitas terhadap sanitasi layak, air bersih dan listrik. Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi layak di Kota Surakarta pada Tahun 2015 sebesar 82,53% berada diatas rata-rata proporsi Jawa Tengah sebesar 65,13% dan nasional sebesar 60,45%.

Untuk proporsi Rumah Tangga dengan akses air minum layak Kota Surakarta pada Tahun 2015 sebesar 54,06% lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 53,35% dan nasional sebesar 40,82%. Sedangkan proporsi Rumah Tangga dengan akses listrik di Kota Surakarta pada Tahun 2015 sebesar 99,69%.

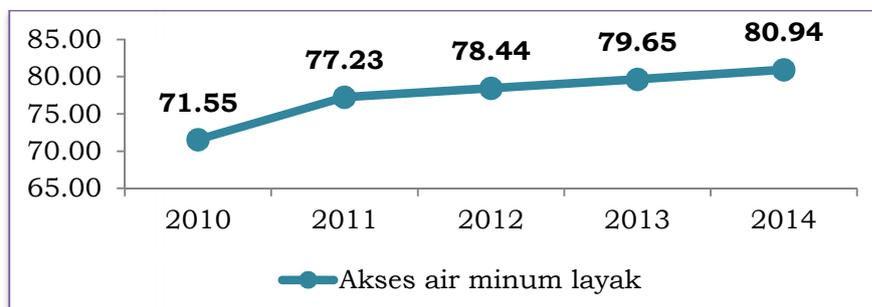
Grafik perkembangan proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi layak, air minum layak dan akses listrik di Kota Surakarta sebagaimana gambar berikut :

Gambar IV.23
Grafik Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Di Kota Surakarta Tahun 2009-2013



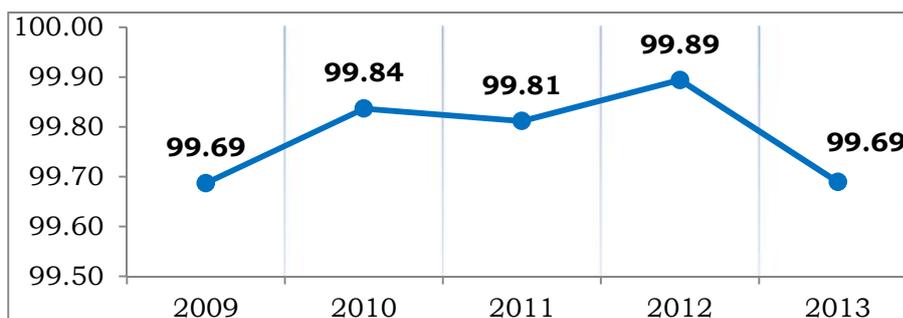
Sumber : BPS Tahun 2014, diolah.

Gambar IV.24
Grafik Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air
Minum Layak (%) Kota Surakarta
Tahun 2010-2014



Sumber : PDAM Kota Surakarta Tahun 2015

Gambar IV.25
Grafik Perkembangan proporsi rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
Kota Surakarta Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Tahun 2014, diolah.

Dari gambar tersebut bahwa pelayanan infrastruktur secara umum relative meningkat.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta.

Menindaklanjuti penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Kota Surakarta membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut dengan TKPKD Kota Surakarta, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. Walikota Surakarta berkedudukan selaku Penanggungjawab. Adapun Ketua adalah Wakil Walikota Surakarta, Kepala Bappeda selaku Sekretaris dan para Asisten selaku Koordinator Kelompok Kerja atau Pokja.

TKPKD Kota Surakarta dibentuk melalui Keputusan Walikota Kota Surakarta Nomor 400.05/10/I/2015 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Kota Surakarta. Pembentukan tersebut dengan mengacu pada Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Koordinasi TKPKD bersifat internal dan eksternal, bersifat internal terdiri dari : rapat koordinasi yang dilaksanakan tiga bulanan bersama dengan kelompok program dan pokja sera rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan model pleno dalam pembahasan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada awal tahun dalam rangka menetapkan mandat penanggulangan kemiskinan dan rapat pleno akhir tahun dalam rangka evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Untuk sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta yang diperbararui / di *up date* setiap semester atau enam bulan sekali, terakhir jumlah penduduk miskin Kota Surakarta ditetapkan dengan Keupusan Walikota Surakarta Nomor 470/39/1/2015.

Susunan organisasi TKPKD Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar bagan berikut :

Gambar IV.26
Struktur Organisasi TKPKD Kota Surakarta



Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta yang dikoordinasikan oleh TKPKD dalam mengimplementasikan sasaran program di lakukan dengan dasar pembagian wilayah administratif per kelurahan.

Metode koordinasi dibangun yaitu dengan mekanisme pola relasi TKPKD dengan kelurahan yaitu dengan dibentuknya Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah melalui musyawarah mufakat

dengan partisipasi unsur masyarakat lebih dari 50%. TPKK merupakan kelembagaan dengan fungsi koordinasi sebagai replikasi model koordinasi TKPKD berikut kewenangannya untuk penanggulangan kemiskinan di kelurahan masing-masing.

Dari lima puluh satu kelurahan yang ada di Kota Surakarta, dengan pertimbangan jumlah penduduk miskin yang tersebar di lima kecamatan, maka dalam prioritas penanganannya dilakukan dengan piloting model didasari pada kelurahan yang termiskin. Lima kelurahan piloting model penanggulangan kemiskinan yaitu : Mojosongo, Pajang, Serengan, Kadipiro dan Tipes yang biasa disebut dengan “Piloting Mojang Sekati”.

Untuk mendapatkan gambaran penanggulangan kemiskinan kelurahan ini, penulis mengambil sampel lima kelurahan saja sebagai sampel dari lima kecamatan dengan penentuan pertimbangan sebagai berikut : Kelurahan Gajahan sampel dari Kecamatan Pasarkliwon mengingat potensi cagar budaya, Kelurahan Sumber sampel dari Kecamatan Banjarsari merupakan daerah perbatasan, Kelurahan Pajang dari Kecamatan Laweyan merupakan sebagai sampel kelurahan dengan tipologi Besar (berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk), Kelurahan Serengan dari Kecamatan Serengan sebagai sampel kelurahan sedang, Kelurahan Kepatihan Wetan dari Kecamatan Jebres sebagai sampel dari kelurahan dengan tipologi kecil.

Dilihat dari jumlah Rumah Tangga (KK) miskin di beberapa kelurahan yang penulis temui, menunjukkan bahwa jumlah KK miskin datanya fluktuatif, beberapa ada pengurangan disebabkan karena pindah dan meninggal sedangkan penambahan merupakan usulan dari pengajuan dari warga miskin yang belum terdata atau yang karena suatu sebab menjadi miskin (karena sakit, PHK atau kecelakaan). Berikut data jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2012-2015 yang penulis dapatkan dari lima kelurahan dari sampel penelitian, sebagai berikut :

Tabel IV.2
Ssampel Data Rumah Tangga Miskin Kelurahan
Tahun 2013-2015

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah tangga Miskin (n KK)		
			2013	2014	2015
1.	Laweyan	Pajang	1.704	1.712	1.808
2.	Serengan	Serengan	766	766	827
3.	Pasarkliwon	Gajahan	219	225	237
4.	Jebres	Kepatihan Wetan	211	209	221
5.	Banjarsari	Sumber	1.175	1.192	1.291

Sumber : Kelurahan Gajahan, Serengan, Pajang, Sumber dan Kepatihan Wetan
Th.2015

Hasil Temuan Penelitian

Dari temuan deskripsi data, informasi dan pembahasan hasil penelitian, maka berdasarkan analisis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dengan metode manajemen strategi, dapat penulis sampaikan diskripsi hasilnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.4
Deskripsi Hasil Temuan Penelitian

Manajemen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta	Temuan
Mengembangkan pernyataan Visi dan Misi	Pelaksana divisi fungsional telah mampu mengembangkan pernyataan Visi Misi Walikota Surakarta untuk pencapaian target RPJMD 2016-2021
Menjalankan Audit Eksternal	Telah dilakukan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan eksternal namun belum memadai untuk persoalan : *Sosial → pelayanan : kesehatan ibu, bayi/balita dan penyakit menular *Kependudukan → pengendalian : urbanisasi dan daya dukung wilayah *Lingkungan → penegakan hukum (hunian liar, pencemaran dan PKL)
Menjalankan Audit Internal	Divisi dan fungsional berjalan baik, tetapi Pelaku usaha / swasta partisipasinya dalam penanggulangan kemiskinan masih kurang,dilihat dari kontribusi alokasi sumber daya CSR
Menetapkan tujuan jangka panjang	Target indikator tujuan jangka panjang telah ditetapkan dalam kebijakan : RPJMD 2016-2021. Visi : Surakarta sebagai Kota Budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Misi 3 WMP : wasis waras wareg mapan dan papan. Penanggulangan kemiskinan dengan target 7,5% di Tahun 2021.
Menciptakan, Mengevaluasi dan Memilih Strategi	a. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang lalu telah ditetapkan sebagai pedoman operasional divisi-fungsional penanggulangan kemiskinan. b. SPKD selanjutnya sesuai arah kebijakan RPJMD 2016-2021 saat ini baru pada tahap persiapan pembahasan, SPKD selanjutnya direkomendasikan mengacu pada prinsip keberkelanjutan dengan mempertimbangkan temuan audit eksternal dan audit internal.
Mengimplementasikan Strategi – Isu-isu Manajemen	a. Efektivitas dan produktivitas dari kinerja divisi fungsional belum berorientasi pada hasil. b. Pola integrasi belum fokus pada sasaran dalam hal ini warga miskin di wilayah based kemiskinan terendah. c. Penanganan konflik sudah difasilitasi melalui ULAS /Pokja Pengaduan.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Pencocokan strategi dengan struktur sudah diidentifikasi dan efektif dioperasionalkan melalui divisi fungsional sesuai kewenangan, e. Data yang dikelola menurut indikator untuk disempurnakan validasinya, mengacu pada tertib administrasi kependudukan. f. Kinerja terendah di kelurahan ada partisipasi dukungan keterlibatan masyarakat.
Mengimplementasikan Strategi – Pemasaran, Keuangan/Akuntansi, Litbang dan MIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi dan edukasi kepada masyarakat miskin belum mudah diakses. b. Partisipasi CSR dalam penanggulangan kemiskinan masih belum terlihat kongkrit, komitmen masih diatas kertas/dokumen. c. Pengembangan inovasi penanggulangan kemiskinan belum dilengkapi perangkat penunjang operasional. d. Sistem Informasi penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi dalam sistem perencanaan dan evaluasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.
Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Target Capaian penurunan angka kemiskinan (2010-2015) sebesar 10% dapat terealisasi 10,97% . b. Untuk menjaga konsistensi perlu dirumuskan target tahunan divisi -fungsional untuk target capaian (2016-2021) yang menetapkan target penurunan angka kemiskinan pada angka 7,5% di Tahun 2021. c. Perlu ditinjau kembali sasaran penerima program bantuan warga miskin dari aspek kelayakan indikator dan kesesuaian administrasi kependudukan d. Keunggulan Kota Surakarta yang bertumpu pada potensi budaya dan vokasional perlu dieksplorasi dan dikembangkan sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.

Faktor Pengungkit.

Dari penjelasan-penjelasan sebagaimana tersebut diatas dalam manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, hal dominan yang dapat penulis simpulkan adalah komunikasi yang terselenggara dengan baik pada tiap-tiap tahapan manajemen strategis, baik di tahap perencanaan strategi, tahap penerapan strategi dan penilaian strategi. Fungsi koordinasi yang difasilitasi oleh TKPKD Kota Surakarta berlangsung baik dan kontinyu. Beberapa koordinasi yang diselenggarakan baik yang bersifat insidental maupun pleno menjadi sarana komunikasi yang efektif. Hal lain yang menjadi factor kunci dalam manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta adalah tersedianya ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan pelibatan stakeholder dan

masyarakat dalam perumusan kebijakan, menentukan strategi, mengimplemntasikan dan penilaian kinerja sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan semangat gotong-royong dalam penanggulangan kemiskinan.

Penutup

Penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta telah menjadi komitmen bersama semua pemangku kepentingan, baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Bahwa ada konsistensi pelaksanaan manajemen strategis penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta mulai dari tahapan perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi (mengukur kinerja).

Pada Tahapan Perumusan strategi yang meliputi : Pernyataan Visi Misi, Penentuan Tujuan jangka Panjang, Penentuan Strategi dan Audit (eksternal dan Internal) dijalankan sesuai normatif dengan mengkedepankan proses-proses demokrasi dan partisipatif. Pengimplementasian strategi baik dengan pendekatan isu-isu manajemen dan pendekatan pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang dan manajemen information systems (MIS) juga diterapkan dengan baik sesuai dokumen perencanaan strategis berupa regulasi SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta. Dari pengimplemtasian strategi, telah dimunculkan berbagai inovasi baik dari kebijakan, pemasaran, MIS dan pengembangan strategi.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan kemiskinan dari hasil penelitian ini bahwa dengan model penanggulangan kemiskinan Kelurahan perlu dibuat pola integrasi yang jelas antara program lintas stakeholder sehubungan dengan alokasi sumber daya dan penerima manfaat dalam hal ini warga miskin untuk menjaga konsistensi terhadap pencapaian tujuan baik tujuan tahunan maupun target tujuan jangka panjang.

Dalam pelaksanaan manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta faktor pengungkit dominan yang menunjang keberhasilan adalah Komunikasi yang terselenggara dengan baik pada tiap-tiap tahapan manajemen strategis, baik di tahap perencanaan strategi, tahap penerapan strategi dan penilaian strategi. Hal lain yang menjadi factor kunci dalam manajemen strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta adalah tersedianya ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan pelibatan stakeholder dan masyarakat dalam perumusan kebijakan, menentukan strategi,

mengimplemmentasikan dan penilaian kinerja sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan semangat gotong-royong.

Daftar Pustaka

David, Fred R. 2009. *Strategic Management*. Diterjemahkan oleh Dono Sunardi 2009. Salemba Empat Pres Jagakarsa, Jakarta.

Rustiadi, Ernani. Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju, 2011. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Badeni, 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Alfabeta Pres. Bandung

Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Stratejik*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Budihardjo, Andreas. 2014. *Organisasi, Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*. Prasetya Mulya Publishing, Cilandak, Jakarta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta Pres, Bandung.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Pres, Bandung.

Nugroho, Riant. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Slamet, Yulius. 2014. *Pengukuran Kemiskinan*. Sebelas Maret University Press, Surakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. Kota Surakarta

Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2015. *Profil Perkembangan kependudukan Kota Surakarta 2014*. Kota Surakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015. *Surakarta Dalam Angka*. Kota Surakarta

Dinas Kesehatan, 2015. *Profil Kesehatan*. Kota Surakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, 2015. *Profil Pendidikan*. Kota Surakarta

Sumber Elektronik :

<http://id.wikipedia.org/wiki/manajemenstrategis>

<http://www.ruangfreelance.com/mengapa-tanpa-manajemen-strategis-perusahaan-akan-kandas>

<http://www.jaringankomputer.org/manajemen-strategi-proses-strategi-manajemen-perusahaan>

<http://www.hipni.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandefinisi-manajemen-strategi.html>

- <http://www.gurupendidikan.com/17-definisi-pengertian-manajemen-strategi-menurut-para-ahli>
- <http://www.definisi.pengertian.com/Manajemen-organisasi>
- <http://www.hariannetral.com/manajemen-strategi>
- <http://www.pengertianku.net/manajemen-strategi>
- <http://www.pengertianmanajemen.net/pengertian-manajemen-stratejik>
- <http://www.jelajahinternet.com/2015/10/7-pengertian-kemiskinan-menurut-para-ahli.html>
- <http://www.landasanteori.com/Sosial-kemiskinan>
- <http://www.pengertian-pengertian-info.blogspot.com/Ekonomi-Pengertian-Kemiskinan>
- <http://www.gudangteori.xyz/Kajianteori-sosial-kemiskinan-menurut-para-ahli>
- <http://www.globallavebookx.blogspot.co.id/Ekonomi-pengertian-kemiskinan-menurut-para-ahli>
- <http://www.seputarpengertian.com/9pengertian-kemiskinan-menurut-para-ahli-dan-penyebabnya>
- <http://www.dokumen.tips/kemiskinan-dan-strategi-pengentasannya>